

**LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN
NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA
KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

Tahun Sidang	: 2012 - 2013
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Direksi LPP TVRI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 1 Juli 2013
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI
Ketua Rapat	: TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP., Kabagset Komisi I DPR RI
Acara	: Laporan Jangkauan Siaran LPP TVRI dan Dukungan Infrastruktur serta Kendala dan Hambatan yang Dihadapi
Hadir	: 47 orang Anggota dari 47 orang Anggota Komisi I DPR RI
Hadir dari Pemerintah	: Direktur Utama LPP TVRI, Sdr. Farhat Syukri, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Direksi LPP TVRI pada hari ini, Senin, tanggal 1 Juli 2013 dengan agenda sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bapak TB Hasanuddin, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI dapat memahami penjelasan dari jajaran Direksi dan para Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) mengenai kinerja LPP TVRI, khususnya terkait dengan jangkauan siaran, dukungan infrastruktur, serta kendala/hambatan yang dihadapi.

2. Komisi I DPR RI meminta LPP TVRI untuk segera menyerahkan **Draft Roadmap/Rencana Strategis** secara komprehensif kepada Komisi I DPR RI, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak 1 Juli 2013.
3. Komisi I DPR RI mendesak LPP TVRI untuk lebih selektif dalam penayangan iklan, dengan merujuk pada visi misi dan tupoksi TVRI sebagai LPP yang melayani kepentingan publik serta menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Terkait penayangan iklan Muktamar Khilafah 2013 Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada awal Juni 2013 di TVRI, Komisi I DPR RI minta Dirut LPP TVRI untuk memberikan klarifikasi tertulis, paling lambat Jumat, 5 Juli 2013.
4. Komisi I DPR RI minta LPP TVRI untuk menyerahkan laporan tertulis penerimaan Non APBN LPP TVRI terhitung Januari 2012 sampai sekarang, berikut laporan penggunaannya, paling lambat Jumat, 5 Juli 2013.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.05 WIB.

Jakarta, 1 Juli 2013
KETUA RAPAT

TB HASANUDDIN
A-350